

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seorang investor melakukan investasi pada sebuah perusahaan pada dasarnya mengharapkan memperoleh pendapatan tambahan atau keuntungan atas investasi yang dilakukan, baik dalam bentuk *capital gain* maupun pendapatan dari dividen (Amoah, 2022). Dividen merupakan salah satu daya tarik seorang investor untuk berinvestasi di pasar modal. Para investor dapat mengevaluasi kinerja dan likuiditas sebuah perusahaan dengan menilai jumlah dividen yang dibagikan. Pembayaran dividen adalah suatu keputusan penting yang dilakukan perusahaan untuk menentukan seberapa besar laba bersih yang diinvestasikan kembali sebagai laba ditahan dan seberapa besar keuntungan yang dibayarkan sebagai dividen (Tahir et al., 2020).

Dividen perusahaan di seluruh dunia mencapai rekor tertinggi dalam sejarah sebesar USD 1,66 triliun pada tahun 2023. Fenomena dividen global pada tahun 2023 menunjukkan dinamika yang menarik dan beragam, mencerminkan kondisi ekonomi yang tidak merata di berbagai wilayah. Berdasarkan laporan *Janus Henderson Global Dividend Index* (JHGDI), total dividen yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia pada tahun 2023 mencapai sekitar USD 1,66 triliun, dengan pertumbuhan yang bervariasi di berbagai kawasan, berikut data statistik pertumbuhan dividen global berdasarkan wilayah:

Tabel 1.1
Pembayaran Dividen Tahunan Berdasarkan Wilayah

<i>Region</i>	2020	*%	2021	*%	2022	*%	2023	*%
<i>Emerging Markets</i>	\$103.7	- 2.7%	\$135.2	- 30.4%	\$153.9	- 13.8%	\$168.9	- 9.7%
<i>Europe ex UK</i>	\$168.8	- 33.0%	\$235.5	- 39.6%	\$259.0	- 10.0%	\$305.8	- 18.1%
<i>Japan</i>	\$80.5	- 5.1%	\$81.8	- 1.6%	\$73.3	- 10.3%	\$78.2	- 6.7%
<i>North America</i>	\$551.0	- 2.8%	\$572.7	- 3.9%	\$631.4	- 10.2%	\$664.6	- 5.3%
<i>Asia Pacific ex Japan</i>	\$129.2	- 19.1%	\$174.4	- 35.0%	\$185.8	- 6.5%	\$170.7	- 8.1%
<i>UK</i>	\$63.1	- 39.3%	\$87.53	- 8.6%	\$89.6	- 2.4%	\$86.9	- 3.0%
<i>Total</i>	\$1,096.2	- 11.8%	\$1,287.0	- 17.4%	\$1,393.0	- 8.2%	\$1,475.1	- 5.9%

*% *change*

Sumber: laporan *Janus Henderson Global Dividend Index (JHGDI)*.

Tabel 1.1 terlihat perkembangan dividen global di tahun 2023 berdasarkan wilayah. Secara keseluruhan, fluktuasi pembayaran dividen di berbagai wilayah global menunjukkan tren yang beragam, dengan kawasan Negara Berkembang dan Asia Pasifik mencatat pertumbuhan yang paling signifikan, di sisi lain Eropa dan Inggris menunjukkan pemulihan yang kuat setelah penurunan awal. Stabilitas di pasar Jepang dan Amerika Utara mencerminkan ketahanan yang lebih besar terhadap ketidakpastian ekonomi. Menekankan pentingnya memahami konteks regional dalam melihat kondisi dividen dan kebijakan dividen perusahaan. Pada konteks global, perkembangan dividen menunjukkan tren yang berfluktuasi dan beragam di berbagai wilayah, melihat kondisi tersebut pentingnya penelitian mengenai dividen menjadi semakin nyata, terutama di Indonesia.

Dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para investor tentu dipengaruhi oleh kebijakan dividen masing-masing perusahaan (Qurochman, 2022). Kebijakan dividen sering kali menghadapi gap dalam metode penilaian yang digunakan. Salah satu contoh gap tersebut adalah kurangnya konsistensi dalam memilih indikator yang tepat untuk mengukur kebijakan dividen, hal ini mengakibatkan variasi hasil yang signifikan antara penelitian yang satu dengan

yang lain, sehingga sulit untuk membuat perbandingan yang akurat atau mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dividen. Berdasarkan hal tersebut untuk mengatasi gap ini, penggunaan *Dividend Payout Ratio* (DPR) menjadi penting.

DPR adalah salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kebijakan dividen perusahaan. DPR menunjukkan persentase laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham, sehingga mencerminkan seberapa banyak perusahaan membagikan keuntungan kepada investor. Penggunaan DPR sebagai indikator kebijakan dividen dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang kesehatan finansial perusahaan, strategi pertumbuhan, dan preferensi investor terhadap pendapatan yang stabil, serta bagaimana perusahaan mengelola laba untuk mencapai tujuan jangka panjangnya (Syahri & Robiyanto, 2020).

Kebijakan dividen perusahaan tercermin melalui *dividend payout ratio* (Almeida et al, 2020). *Dividend payout ratio* berfungsi sebagai panduan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi di masa mendatang (Meidawati et al., 2020). Persentase laba yang dibagikan sebagai dividen dapat memengaruhi daya tarik investor, karena semakin tinggi persentase yang dibagikan, semakin besar pula minat investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Nurfaitul & Jasiyah, (2022) mengatakan DPR mencerminkan komitmen perusahaan untuk membagikan laba kepada pemegang saham, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang cukup untuk mendukung pembayaran. DPR yang baik adalah yang seimbang, di mana perusahaan mampu memberikan dividen yang menarik bagi investor sambil tetap memiliki cukup laba untuk diinvestasikan kembali dalam pertumbuhan

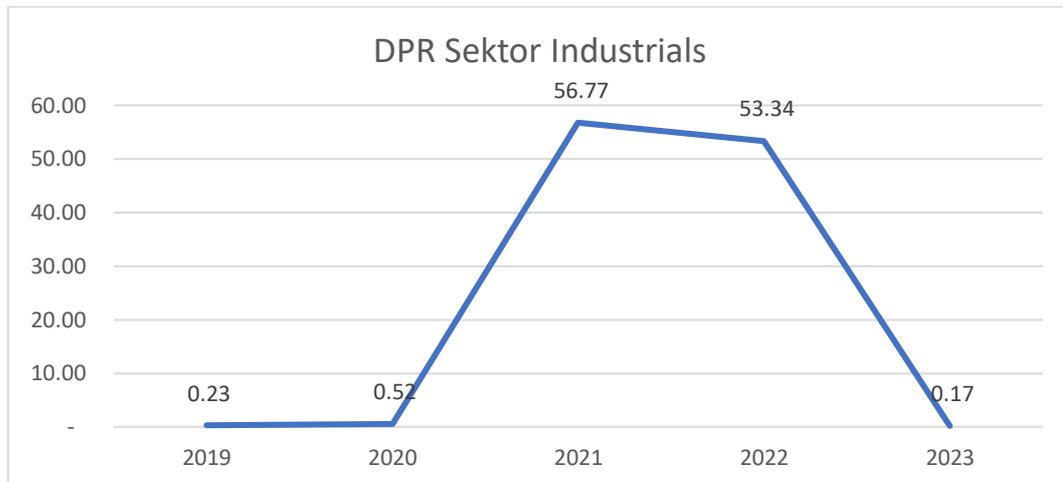
dan pengembangan bisnis. Berikut ini data statistik deskriptif mengenai rata-rata *Dividend Payout Ratio* persektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.

Tabel 1.2
Data Rata-Rata *Dividend Payout Ratio* Pada Perusahaan Persektor Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Basic Materials</i>	0,15	0,23	0,13	0,35	0,42
<i>Consumer Cylical</i>	0,16	0,33	0,34	50,65	0,58
<i>Consumer non Cylical</i>	0,28	0,26	0,27	0,36	0,56
<i>Energy</i>	0,18	0,25	0,2	130,7	0,49
<i>Financial</i>	0,3	0,28	0,22	0,2	0,23
<i>Healthcare</i>	0,26	0,28	0,31	0,36	0,66
<i>Industrials</i>	0,23	0,52	56,77	53,34	0,17
<i>Real Estate</i>	0,07	0,12	0,12	0,13	3,49
<i>Technology</i>	0,16	0,17	0,37	0,52	0,23

Sumber: data diolah penulis 2025.

Berdasarkan Tabel 1.2 masing-masing sektor memiliki rata-rata *dividend payout ratio* yang berbeda-beda, sehingga pada penelitian ini akan menggunakan perusahaan sektor *industrials* sebagai subjek, dikarenakan berdasarkan Tabel 1.2, DPR sektor *industrials* menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Sektor *industrials* menurut Bursa Efek Indonesia adalah salah satu sektor ekonomi yang mencakup perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam produksi barang modal, penyediaan jasa pendukung industri, dan konstruksi. Sektor ini sering dianggap sebagai tulang punggung ekonomi karena berperan penting dalam pengembangan infrastruktur dan penyediaan kebutuhan industri lainnya, maka dari itu investor memutar dana atau menaruh dananya untuk mencapai suatu keuntungan dan menilai suatu perusahaan di sektor *industrials* untuk investasi terpercaya. Berikut ini grafik kebijakan dividen sektor *industrials* yang diukur dengan *dividend payout ratio* (DPR) selama tahun 2019-2023.



Sumber: data diolah penulis 2025.

Gambar 1.1 Rata-Rata DPR Sektor *Industrials* Tahun 2019-2023

Berdasarkan Gambar 1.1, Pada tahun 2019, DPR sektor industri tercatat cukup rendah. Menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih untuk menginvestasikan kembali sebagian besar laba mereka dibandingkan dengan membagikannya kepada pemegang saham. Pendekatan tersebut bisa disebabkan oleh kebutuhan untuk memperkuat basis modal dan mendanai ekspansi. Memasuki tahun 2020, terjadi peningkatan dalam DPR. Peningkatan tersebut dipicu oleh beberapa faktor, termasuk tekanan dari pemegang saham untuk meningkatkan dividen di tengah ketidakpastian pasar yang disebabkan adanya pandemi COVID-19. Perusahaan merespon dengan membagikan lebih banyak laba sebagai upaya untuk mempertahankan kepercayaan pemegang saham. Terjadi peningkatan DPR sangat tinggi di tahun 2021-2022 melebihi angka 100%, hal tersebut artinya perusahaan membagikan dividen melebihi laba bersihnya, hal tersebut bisa terjadi ketika perusahaan menggunakan cadangan laba tahun-tahun sebelumnya untuk membayar dividen (Mahopatra & Panda, 2022). Terjadi penurunan DPR yang sangat tajam terjadi di tahun 2023 berbanding terbalik dengan keadaan nilai DPR ditahun sebelumnya.

Penurunan DPR tersebut diakibatkan oleh, dilansir di media CNBC Indonesia (28 Juni 2023), terdapat penurunan harga komoditas, sektor *industrials* yang ditopang emiten penyedia jasa untuk sektor energi harus terkoreksi 4% seiring penurunan harga komoditas. Penurunan harga komoditas, terutama batu bara, yang telah mengalami penurunan signifikan, berdampak langsung pada kinerja perusahaan-perusahaan di sektor ini. Fenomena tersebut menyebabkan kekhawatiran di kalangan investor mengenai prospek laba bersih yang mungkin akan menurun dalam beberapa kuartal ke depan, akibat dari kondisi ini banyak perusahaan di sektor *industrials* yang terpaksa mengurangi dividen yang mereka bayar kepada pemegang saham dan beberapa bahkan tidak membayar dividen.

Kebijakan dividen merupakan salah satu keputusan penting dalam manajemen keuangan perusahaan yang mencerminkan alokasi laba bersih antara dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dan laba yang ditahan untuk reinvestasi. Kebijakan dividen dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi Kebijakan dividen di sebuah perusahaan, diantaranya seperti profitabilitas. Menurut penelitian oleh Al-Najjar & Kilincarslan (2020), perusahaan yang memiliki laba bersih stabil dan konsisten lebih mungkin mempertahankan atau meningkatkan pembayaran dividennya. Faktor selanjutnya adalah likuiditas, struktur modal dan *leverage*, perusahaan dengan arus kas operasi yang kuat cenderung membagikan dividen yang lebih tinggi karena memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kewajiban dividen tanpa mengganggu operasional perusahaan (Nguyen & Nguyen, 2020). Struktur modal, khususnya tingkat *leverage* (utang), juga memengaruhi kebijakan dividen. Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi cenderung membatasi pembayaran dividen untuk memenuhi kewajiban

pembayaran bunga dan pokok hutang (Boubaker & Nguyen, 2020). Banyaknya faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen di perusahaan, *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik menjadi yang terpenting. GCG memastikan bahwa keputusan dividen dibuat secara transparan, akuntabel, dan seimbang, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan (Aluchna & Rok, 2021).

Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan kerangka kerja yang mengatur hubungan antara dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Graham & Leary, 2021). Penelitian terkait manajemen keuangan, beberapa dimensi GCG yang sering digunakan meliputi transparansi, akuntabilitas, independensi dewan dan karakteristik dewan. Dimensi-dimensi ini dianggap penting karena memastikan bahwa keputusan perusahaan, termasuk kebijakan dividen, dibuat secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Kebijakan dividen perusahaan tentunya berdasarkan keputusan dewan dan manajemen perusahaan, oleh karena itu peran dewan komisaris dan direksi menjadi sangat penting (Milasinovic et al., 2023).

Penurunan dividen yang terjadi di sektor *industrials*, terutama akibat penurunan harga komoditas seperti batu bara, semakin menegaskan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan *Good corporate governance* (GCG) menjadi semakin jelas, perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip GCG yang kuat dapat lebih transparan dalam mengelola risiko dan menjelaskan kepada pemegang saham mengenai langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi tantangan pasar (Tjahjadi et al, 2021).

Perusahaan ketika pemilik tidak lagi bertanggung jawab dan melakukan pengelolaan perusahaan, maka ada dua kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda yang akan terlibat dalam menentukan kebijakan dividen, dengan adanya perbedaan tersebut akan memunculkan konflik yang disebut *agency problem*. Perilaku tersebut sesuai dengan pendapat Basheer et al. (2021), *agency theory* dalam keuangan perusahaan, yang juga merupakan ide dibalik pembentukan tata kelola perusahaan (CG), menyatakan bahwa *agency problem* muncul ketika terdapat konflik kepentingan antara pemegang saham dan agen. Prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada era ini bukan hanya sebagai alat bantu kerja, namun sudah termasuk ranah strategi bisnis, maka pengambilan keputusan dan pengawasan pun telah menjadi agenda penting dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan.

Agency theory menjelaskan, manajemen bertindak sebagai sebagai pengelola atau agen yang diberi wewenang oleh pemilik perusahaan untuk mengatur dan mengelola perusahaan sehingga menguntungkan pemilik perusahaan, sementara pemegang saham bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja manajemen (Muntahanah et al., 2021). Berhubungan dengan keputusan tentang pembagian dividen menjadi tanggung jawab manajemen, menjadi tugas manajemen untuk meningkatkan keuntungan dan membayarkan dividen kepada pemegang saham.

Agency theory menyebutkan adanya kebijakan dividen berupaya untuk mengurangi masalah yang berhubungan dengan asimetri informasi. Dividen mengurangi arus kas yang tersedia, sehingga jika perusahaan tidak membayar dividen ke para pemegang sahamnya, para manajer akan mulai menggunakan

sumber daya untuk kepentingan pribadinya (Al-Hiyari et al, 2024). Mendistribusikan arus kas sebagai dividen, memungkinkan eksploitasi oleh manajer dapat dikurangi. Sehingga dapat membantu mengurangi masalah keagenan, selain itu kebijakan dividen di perusahaan juga terkait dengan tata kelola perusahaan seperti karakteristik dewan, karakteristik dewan memengaruhi seberapa efektif keputusan kebijakan dividen (Milasinovic et al., 2023).

Perkembangan zaman pemangku kepentingan menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan dividen dipengaruhi oleh karakteristik dewan, yaitu adanya keragaman gender pria dan wanita di dewan perusahaan (*board gender diversity*) (Ye et al., 2019). Kesetaraan gender kehadiran wanita dalam dewan perusahaan menjadi perhatian utama, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah wanita di dewan perusahaan pada negara maju seperti di Amerika Serikat (Solal & Snellman, 2019).

Keragaman gender semakin dianggap sebagai kekuatan utama dan nilai tambah yang membedakan perusahaan, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa wanita yang memiliki talenta dan duduk di dewan perusahaan menjadi komponen penting dalam pengambilan keputusan dewan (Duppatti et al., 2020). Studi telah menunjukkan bahwa perempuan dapat berbeda secara signifikan dari laki-laki dalam hal etika kerja, moralitas pribadi, ketakutan terhadap risiko, dan perilaku pengambilan keputusan. Manajer perempuan juga lebih takut terhadap risiko dan lebih sering menghadiri rapat daripada direktur dewan laki-laki (Ye et al., 2019).

Sejalan dengan *agency theory*, kehadiran wanita dalam dewan direksi lebih efektif untuk memantau manajer daripada rekan-rekan gender pria, pemantauan ini mengurangi kemungkinan tindakan oportunistik dan meningkatkan alokasi arus kas

untuk pembayaran dividen (Trinh et al., 2021). Kebijakan pembayaran dividen bagi pemegang saham akan lebih baik jika lebih keragaman gender di dewan perusahaan (Tahir et al., 2020). Keberadaan keragaman gender pada dewan perusahaan, memungkinkan untuk mengkombinasikan kualitas dan keterampilan antara dewan pria dan dewan wanita, yang akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sehingga akan berpengaruh terhadap pembagian dividen bagi pemegang saham (Ain et al., 2021).

Karakteristik lain selain keragaman gender pada dewan (*board gender diversity*) di perusahaan terkait tata kelola perusahaan yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah anggota dewan independen (*independent board member*) (Kumar et al., 2023). Komisaris independen adalah individu yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, pemegang saham, atau manajemen yang dapat memengaruhi keputusan mereka. Tugas utama komisaris independen adalah untuk memberikan pengawasan yang objektif dan menilai kinerja manajemen, serta melindungi kepentingan pemegang saham, mereka berperan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut keberadaan komisaris independen di dalam perusahaan sangatlah penting (Purnomo et al., 2021). Menurut FCGI, tata kelola perusahaan memiliki peran krusial dalam pengelolaannya, di mana komisaris independen bertugas untuk melindungi operasional perusahaan dan memantau manajemen dalam menjalankan tugasnya, serta memastikan pencatatan yang tepat di perusahaan (Sembiring & Saragih, 2019).

Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan non-keuangan dengan dewan independen cenderung memiliki pendekatan yang lebih baik terhadap

kebijakan dividen. Independensi dewan komisaris memastikan bahwa hubungan kebijakan dividen dan biaya agensi tidak terganggu. Komisaris independen mencegah konflik kepentingan dan membantu dewan membuat keputusan yang baik untuk perusahaan dan pemegang sahamnya (Nurdin & Yunus Kasim, 2018). Aspek Selain itu, independensi dewan komisiaris memastikan bahwa kebijakan dividen dan biaya agensi tidak terganggu. Dewan independen mencegah konflik kepentingan dan membantu dewan membuat keputusan yang baik untuk perusahaan dan pemegang sahamnya (Devi et al., 2024).

Komisaris independen memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan dividen perusahaan. Sebagai pihak yang tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan, mereka berfungsi sebagai pengawas yang memastikan bahwa keputusan manajemen, termasuk kebijakan dividen, sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Studi oleh Ain et al., (2021) menemukan bahwa keberagaman dewan, termasuk keberadaan komisaris independen, dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan terkait kebijakan dividen. Berdasarkan hal tersebut, peran komisaris independen dalam kebijakan dividen dapat bervariasi tergantung pada konteks dan karakteristik perusahaan.

Alasan dalam pemilihan variabel pada penelitian ini adalah karena terdapat ketidak konsistenan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan terhadap variabel independen yaitu *board gender diversity* dan *independent board member*. Beberapa penelitian terdahulu telah mendukung hasil positif antara proposi direksi perempuan dengan pembayaran dividen, seperti penelitian yang dilakukan pada pasar saham di Amerika oleh (Benjamin & Biswas, 2019), lalu penelitian yang dilakukan di Malaysia oleh (Tahir et al., 2020). Berbeda dengan penelitian yang

dilakukan oleh Sanan, (2019) dan Mustafa et al., (2020) melaporkan hasil hubungan negatif antara dewan direksi perempuan dengan kebijakan dividen di India dan Russia, sementara penelitian oleh Davin & Bangun, (2021) menyatakan bahwa keberagaman gender tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen.

Kilincarslan, (2021) dalam penelitiannya di Turki dan Chintrakarn et al., (2022) di Amerika menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Bertentangan dengan penelitian Al-Kahmisi & Hassan, (2018) dan Tjipta et al., (2022) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, menunjukkan bahwa komisaris independen pada penelitian Tjipta tidak berfungsi dengan baik dalam bank-bank Malaysia untuk mengurangi konflik dan masalah *agency cost* antara dewan direksi dengan pemegang saham. Penelitian oleh Yoewono, (2023) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2021

Berdasarkan adanya kesenjangan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh *board gender diversity* dan *independent board member* terhadap kebijakan dividen. Pada penelitian ini terdapat variabel moderasi yaitu ukuran perusahaan sebagai kebaruan penelitian. ukuran perusahaan didefinisikan atau diukur berdasarkan total aset, total penjualan, keuntungan, beban pajak dan faktor lainnya. Perusahaan berukuran besar dan memiliki laba ditahan yang besar membayar dividen lebih banyak, Perusahaan besar akan memiliki akses lebih mudah terhadap sumber pendanaan yang sesuai (Nair et al.,2020).

Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dengan tujuan apakah ukuran perusahaan memperkuat atau memperlemah pengaruh *board gender diversity* dan *independent board member* terhadap kebijakan dividen, karena perusahaan besar cenderung membagikan dividen yang besar dari pada perusahaan kecil. Penelitian di Indonesia masih belum banyak ditemukan penelitian yang menggunakan ukuran perusahaan memoderasi *board gender diversity* dan *independent board member* terhadap kebijakan dividen, maka sebagai keterbaruan dalam penelitian ini akan menguji apakah ukuran perusahaan memoderasi *board gender diversity* dan *independent board member* terhadap kebijakan dividen. Penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi baru dengan menguji apakah ukuran perusahaan dapat berfungsi sebagai moderasi yang memengaruhi hubungan antara *board gender diversity* dan *independent board member* terhadap kebijakan dividen.

Tabel 1.3
Research Gap

Variabel	Peneliti	+	-	Tidak signifikan
Pengaruh <i>Board Gender Diversity</i> dan <i>Independent Board Member</i> Terhadap Kebijakan Dividen, Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi.	Benjamin & Biswas, (2019)	✓		
	Tahir et al., (2020)	✓		
	Sanan, (2019)		✓	
	Mustafa et al., (2020)		✓	
	Davin & Bangun, (2021)			✓
	Kilincarslan, (2022)	✓		
	Chintrakarn et al., (2022)	✓		
	Al-Kahmisi & Hassan, (2018)		✓	
	Tjipta et al., (2022)		✓	
	Yoewono, (2023)			✓

Sumber: data diolah peneliti 2025.

Mengingat kurangnya konsensus dalam literatur tentang *board gender diversity*, dan *independent board member* mengenai pengaruhnya pada kebijakan dividen yang menekankan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi maka, skripsi ini bertujuan untuk mengeksplorasi *board gender diversity*, dan *independent*

board member terhadap kebijakan dividen yang menunjukkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi serta mengeksplorasi apakah ada pengaruh dari keberadaan *board gender diversity*, *independent board member* dan keterlibatan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen untuk memberikan alasan strategis bagi para investor untuk melakukan investasi. Penulis menyarankan agar keterlibatan *board gender diversity*, *independent board member* dan ukuran perusahaan membangun reputasi yang baik bagi perusahaan, akibatnya terhadap kebijakan dividen di sebuah perusahaan. Dalam literatur yang ada, bukti empiris tentang hubungan yang diusulkan sangat sedikit.

Peneliti, menawarkan kontribusi untuk literatur *board gender diversity*, *independent board member* dalam konteks tata kelola perusahaan dengan mendukung salah satu sudut pandang yang ada terkait dengan pengaruh *board gender diversity*, dan *independent board member* terhadap kebijakan dividen yang dimoderasi dengan variabel ukuran perusahaan. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang dikemukakan, penulis tertarik untuk melakukan analisis mengenai pengaruh *board gender diversity* dan *board independent member* terhadap kebijakan dividen dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. Maka dari itu penulis merumuskan judul penelitian yaitu.

“PENGARUH *BOARD GENDER DIVERSITY* DAN *INDEPENDENT BOARD MEMBER* TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI PEMODERASI (Studi Pada Perusahaan Sektor *Industrials* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, bagian identifikasi masalah pada penelitian ini menjelaskan pokok masalah yang tercermin di bagian latar belakang penelitian. Rumusan masalah menggambarkan permasalahan yang tercakup di penelitian, seluruh masalah dari variabel yang dilibatkan dalam penelitian dapat tergambar dengan jelas dalam rumusan masalah.

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Fenomena dividen global pada tahun 2023 menunjukkan dinamika yang menarik dan beragam, mencerminkan kondisi ekonomi yang tidak merata di berbagai wilayah.
2. Indeks sektor *Industrials* pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi *dividend payout ratio* diantara sektor-sektor lainnya.
3. Kebijakan dividen yang diukur dengan *dividend payout ratio* (DPR) di tahun 2023 pada sektor *industrials* mengalami penurunan cukup drastis karena penurunan harga komoditas.
4. *Agency theory* adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan agen (manajemen) dapat mempengaruhi kebijakan dividen.
5. Penelitian terdahulu tentang kebijakan dividen yang dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, *board gender diversity* dan *independent board member* belum menunjukkan hasil yang konsisten.
6. Keberagaman gender dalam penerapan tata kelola perusahaan sering diperdebatkan dalam kebijakan dividen di perusahaan.

7. Komisaris independen memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan dividen.
8. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *board gender diversity* dan *board independent member* terhadap kebijakan dividen, di mana perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki kebijakan dividen yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan kecil.

1.2.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi *Board Gender Diversity*, *Independent Board Member*, Kebijakan Dividen dan Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Sektor *Industrials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.
2. Bagaimana pengaruh *Board Gender Diversity* dan *Independent Board Member* secara simultan terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Sektor *Industrials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.
3. Bagaimana pengaruh *Board Gender Diversity* secara parsial terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Sektor *Industrials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.
4. Bagaimana pengaruh *Independent Board Member* secara parsial terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Sektor *Industrials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.

5. Bagaimana pengaruh *Board Gender Diversity* yang dimoderasi Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Sektor *Industrials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.
6. Bagaimana pengaruh *Independent Board Member* yang dimoderasi Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Sektor *Industrials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, serta mengkaji:

1. Kondisi *Board Gender Diversity*, *Independent Board Member*, Kebijakan Dividen dan Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Sektor *Industrials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.
2. Pengaruh *Board Gender Diversity* dan *Independent Board Member* secara simultan terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Sektor *Industrials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.
3. Pengaruh *Board Gender Diversity* secara parsial terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Sektor *Industrials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.
4. Pengaruh *Independent Board Member* secara parsial terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Sektor *Industrials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.

5. Pengaruh *Board Gender Diversity* yang dimoderasi Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Sektor *Industrials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.
6. Pengaruh *Independent Board Member* yang dimoderasi Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Sektor *Industrials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang hendak dicapai, hasil penelitian ini diharapkan akan mempunyai kegunaan baik itu secara teoritis, maupun secara praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memberi kontribusi serta memperluas ilmu pengetahuan mengenai pengaruh *board gender diversity* dan *independent board member* terhadap kebijakan dividen dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, referensi, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. Pengembangan teori tata kelola perusahaan dengan mempertimbangkan konteks hubungan antara *board gender diversity* dan *independent board member* terhadap kebijakan dividen dengan moderasi ukuran perusahaan.
2. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan dasar teoritis yang kuat bagi praktisi dan manajer dalam mengimplementasikan kebijakan *corporate governance* yang baik.

3. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk mendorong partisipasi gender yang lebih seimbang dalam dewan perusahaan, serta pentingnya memiliki komisaris independen yang efektif, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dividen.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini dapat memberikan kesempatan bagi peneliti untuk dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama penulis menempuh perkuliahan. Peneliti dapat memperluas pemahaman mereka tentang teori agensi, tata kelola perusahaan dan penerapannya dalam konteks kebijakan dividen dan dapat mengembangkan keterampilan penelitian dan analisis dalam bidang manajemen dan keuangan perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Perusahaan dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan *corporate governance* yang lebih baik. Dengan memahami pengaruh *board gender diversity* dan keberadaan komisaris independen, perusahaan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja keuangan, serta menarik minat investor.

3. Bagi investor

Investor dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk membuat keputusan investasi yang lebih informasi. Dengan memahami bagaimana karakteristik

dewan perusahaan memengaruhi kebijakan dividen, investor dapat mengevaluasi potensi risiko dan imbal hasil dari investasi mereka, serta memilih perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik.

4. Bagi Regulator OJK

Bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya mendorong keberagaman gender dalam dewan perusahaan dan meningkatkan keberadaan komisaris independen. Temuan ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih baik dalam rangka meningkatkan tata kelola perusahaan di pasar modal Indonesia.